E-ISSN: XXXX-XXXX
JPIK: JURNAL PENELITIAN ILMU KESEHATAN

PEMANFAATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MAHASISWA KESEHATAN DALAM MEMBANGUN SISTEM KESEHATAN YANG BERKEADILAN

Emelia Marbun[1], Jescika Chornelia Harianja[2], Laurensia Zega[3], Maria Fransiska Kloe Anapah[4], Sookhiwoloo Nduru[5], Tumiar Angelina Sitanggang[6], Betrand Silverius Sitohang[7]

[1,2,3,4,5,6] Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan
[7] Universitas Katolik Santo Thomas

emeliamarbun@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran sosial mahasiswa sebagai warga negara yang aktif. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mahasiswa dapat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam kebijakan kesehatan dan akses layanan kesehatan yang setara. Dengan rumusan masalah Bagaimana kajian pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam menciptakan sistem kesehatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan pustaka dan normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pendidikan tinggi dapat meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi mahasiswa dalam isu-isu kesehatan masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam kebijakan kesehatan dan advokasi layanan kesehatan yang inklusif. Dalam konteks kesehatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi tenaga medis yang kompeten tetapi juga agen perubahan yang mendorong keadilan sosial. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam advokasi untuk kelompok-kelompok marginal yang sering kali terabaikan dalam sistem kesehatan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat di daerah terpencil.

Kata Kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan; Partisipasi Mahasiswa; Sistem Kesehatan; Keadilan Sosial; Mahasiswa Kesehatan.*

Abstract

Civic Education aims to shape students' character and social awareness as active citizens. Through civic education learning, students can understand the importance of their participation in health policy and equal access to health services. With the formulation of the problem How the study of civic education can increase student involvement in creating a fair health system for all levels of society. The approach taken in this research is literature review and normative methods. The results obtained from this study indicate that the integration of civic values in higher education can increase social awareness and student participation in public health issues. By understanding their rights and obligations as citizens, students are expected to actively contribute to health policy and advocacy for inclusive health services. In the context of health, students are expected not only to become competent medical personnel but also agents of change that promote social justice. For example, they can engage in advocacy for

marginalized groups that are often overlooked in the health system, such as women, children, and communities in remote areas.
Keywords: *Citizenship Education; Student Participation; Health System; Social Justice; Health Students.*

Pendahuluan

Pendidikan mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya membentuk dan mewujudkan cita–cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Birawa,2023) Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang studi yang berfokus pada pembentukan warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran sosial mahasiswa sebagai warga negara yang aktif. Dalam konteks kesehatan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi tenaga medis yang kompeten tetapi juga agen perubahan yang mendorong keadilan sosial. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mahasiswa dapat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam kebijakan kesehatan dan akses layanan kesehatan yang setara. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dengan memahami prinsip-prinsip ini, mahasiswa kesehatan dapat lebih peka terhadap isu-isu ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan. Misalnya, dalam penelitian berjudul "Membandingkan ketimpangan ketersediaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Di Wilayah Indonesia Timur" (Hikmah Nurul,2020) dengan hasil penelitian bahwa di puskesmas wilayah Indonesia Timur, data menunjukkan tenaga dokter dan bidan adalah jenis tenaga kesehatan yang belum terdistribusi dengan baik bahkan terjadi kekosongan tenaga di beberapa puskesmas di wilayah Indonesia Timur. Sejumlah puskesmas memiliki ketersediaan tenaga kesehatan yang rendah serta tingkat kemiskinan tinggi dilihat dari status ekonomi rumah tangga.

Dalam jurnal "Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember" Ulfa Irma (2020) berisikan bahwa implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif penurunan stunting di Kabupaten Blora belum semuanya berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, penyebaran informasi belum maksimal, kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat, serta data yang tidak valid (Probohastuti & Rengga, 2019).

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan kampanye kesehatan, mahasiswa dapat menyuarakan pentingnya akses yang adil terhadap layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. konteks ini, mahasiswa dapat berperan sebagai pemimpin dalam organisasi kemahasiswaan atau komunitas yang fokus pada isu-isu kesehatan.

Dengan keterampilan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi penyebar informasi tetapi juga agen perubahan yang mampu mempengaruhi kebijakan kesehatan di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi mahasiswa dalam membangun sistem kesehatan yang berkeadilan juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diajarkan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul "Pemanfaatan Pendidikan kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Kesehatan Dalam Membangun Sistem Kesehatan Yang Berkeadian"

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dan normatif, yaitu penelitian dengan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa jurnal yang berkaitan tentang Pemanfaatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Kesehatan Dalam Membangun Sistem Kesehatan Yang Berkeadilan dan menggunakan metode normatif menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai UU kesehatan seperti Pasal 28 H dan pasal 34 ayat (3) UUD 1945 "Kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab bagi negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan".

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pancasila Sebagai pilar Kesehatan Masyarakat

Pancasila, sebagai dasar dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, memegang peran krusial sebagai pilar kesehatan masyarakat dalam membentuk kesadaran dan aksi berbasis nilai-nilai luhur. Filosofi kehidupan ini mengandung nilai-nilai yang tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga praktis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks kesehatan.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong kesadaran akan nilai suci tubuh sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dihormati. Kemanusiaan yang adil dan beradab memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sehat dan beradab,menciptakan kesadaran akan perlunya menjaga kesehatan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan.

Persatuan dan kesatuan dalam bhinneka tunggal ika mendorong kolaborasi dan perhatian bersama dalam mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik.Sila kerakyatan memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya mencapai dan mempertahankan kesehatan yang optimal. Masyarakat dipandang sebagai subjek yangberhak berpartisipasi dalam setiap aspek kesehatan, dari pengambilan keputusan hingga implementasi program-program kesehatan. Terakhir, sila keadilan sosial mengajarkan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan kesehatan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya tanpa diskriminasi.

Melalui penerapan nilai-nilai luhur Pancasila, diharapkan tercipta masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan, berpartisipasi aktif dalam Upaya menjaga kesehatan, dan mengupayakan pelayanan kesehatan yang merata demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Menurut Penelitian Ayu (2024), Pancasila juga menjadi inspirasi untuk pengembangan kebijakan kesehatan yang berkeadilan. Prinsip-prinsip Pancasila meresapi perumusan kebijakan sehingga Upaya pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi kesehatan tidak hanya tersedia bagi segmen tertentu masyarakat, melainkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran dan aksi masyarakat terkait kesehatan, diharapkan tercipta budaya sehat yang kuat dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan sebagai nilai luhur yang

diperjuangkan bersama akan menciptakan transformasi positif, tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada skala komunitas sehingga melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai pilar kesehatan masyarakat, usaha bersama membentuk masyarakatyang sehat, berdaya, dan berkeadilan dapat diupayakan.

Sila keadilan sosial dalam Pancasila memberikan dorongan kuat untukmenciptakan kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan dan pembangunan saranakesehatan. Keberlanjutan pembangunan kesehatan diukur dari sejauh mana pelayanankesehatan dapat merata dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu,aksi berbasis nilai-nilai Pancasila di bidang kesehatan harus mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan.

2. Kebijakan Pembangunan (UU Kesehatan)

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengaku dan melindungi kesehatan sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 28 H dan pasal 34 ayat (3) UUD 1945 "Kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab bagi negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan". Pembangunan kesehatan sebagai upaya negara memberikan pelayanan kesehatandidukung oleh sumber daya kesehatan, baiktenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan.

UU 23 Tahun 1992 UU Kesehatan mengutamakan:

a. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan swasta dengan kemitraan kepada pihak masyarakat.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia.

Dalam UU No 36 tahun 2009 ini, pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

a. Asas perikemanusiaan, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
b. Asas keseimbangan, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
c. Asas manfaat, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
d. Asas pelindungan, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, artinya bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

f. Asas keadilan, artinya bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
g. Asas gender dan nondiskriminatif, artinya bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
h. Asas norma agama, artinya pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

3. Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari pada Mahasiswa Kesehatan

A. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Jadi perawat harus mampu menjaga perilaku dengan baik, merawat pasien sebagai mana mestinya. Berikut ini contoh dari perilaku seorang mahasiswa/i kesehatan sesuai dengan sila pertama:

a. Berdoa sebelum dan setelah menolong pasien
b. Mengajarkan pasien untuk menyerahkan hasil pertolongan kepada Tuhan YME
c. Menghormati kepercayaan dan agama pasien
d. Memegang teguh prinsip bahwa agama dan kepercayaan menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
e. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada pasien.

B. Sila kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)

Mahasiswa/i kesehatan harus mampu bersikap adil dalam menghadapi pasien, baik itu kaya-miskin, tua-muda, besar-kecil, semua diperlakukan sama, dilayani sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Berikut ini contoh dari perilaku mahasiswa/i kesehatan sesuai dengan sila kedua:

a. Memperlakukan pasien dengan penuh empati karena pasien memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat.
b. Perawat selalu berusaha mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
c. Dasar pelayanan mahasiswa kesehatan yang baik yaitu dengan rasa kecintaan pada sesama manusia.
d. Tidak berlaku semana-mena terhadap pasien
e. Selalu berani untuk membela kebenraran dan keadilan dalam hukum.

C. Sila ketiga (Persatuan Indonesia)

Disini dijelaskan penerapan sikap seorang mahasiswa/i kesehatan dalam menjunjung tinggi persatuan saat melaksanakan tugasnya. Contoh sikap seorang mahasiswa/i kesehatan dalam menjunjung tinggi persatuan sebagai berikut :

a. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
b. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi.

c. Analis kesehatan harus menjalin hubungan baik terhadap sesama perawat lain, staf kesehatan lainnya, pasien dan keluarga agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan.
d. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
e. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

D. Sila keempat (Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan)

Disini dijelaskan sikap seorang mahasiswa/i kesehatan yang menujunjung tinggi nilai pada sila keempat. Berikut ini contoh sikap dari seorang mahasiswa/i kesehatan berdasarkan sila keempat:

a. Sebelum melakukan tindakan pelayanan kepada pasien mahasiswa/i kesehatan hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien
b. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

E. Sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Disini dijelaskan sikap seorang mahasiswa/i kesehatan yang menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai dengan nilai kelima. Berikut ini contoh sikap dari seorang mahasiswa/i kesehatan berdasarkan sila kelima:

a. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien.
b. Antara hak dan kewajibannya perlu diseimbangkan. Lebih mementingkan keselamatan pasien tapi tidak mengabaikan keselamatan analis kesehatan itu sendiri.
c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
d. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.
e. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
f. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
g. Suka bekerja keras.

4. Keterlibatan mahasiswa dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang adil.

Keterlibataan Mahasiswa sangat penting, terutama dalam konteks pengembangan kesadaran sosial, partisipasi aktif, dan pemecahan masalah secara kolektif. Berikut adalah beberapa cara di mana mahasiswa dapat terlibat dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan untuk tujuan:

Meningkatkan Kesadaran tentang Kesehatan Masyarakat: Pendidikan kewarganegaraan dapat membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk hak atas kesehatan yang layak. Melalui kuliah, seminar, atau kegiatan kampus, mahasiswa dapat menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya akses terhadap layanan kesehatan yang adil dan merata di masyarakat.

Advokasi Kebijakan Kesehatan: Mahasiswa dapat terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung sistem kesehatan yang lebih adil. Ini bisa berupa kampanye untuk akses kesehatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu atau terpinggirkan. Dalam hal ini, mereka bisa bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan atau pemerintah untuk mengusulkan perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pengorganisasian Kegiatan Kesehatan: Mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti kampanye pemberantasan penyakit, penyuluhan tentang pola hidup sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan kewarganegaraan untuk menyelenggarakan program-program tersebut dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Pendidikan Kewarganegaraan dan Keberagaman: Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan tentang pentingnya keberagaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Mahasiswa dapat mempromosikan nilai-nilai inklusivitas dalam kebijakan kesehatan, memastikan bahwa semua kelompok, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan.

Penelitian dan Pengembangan Program Kesehatan: Mahasiswa, terutama yang belajar di bidang kesehatan atau sosial, dapat terlibat dalam penelitian untuk mengidentifikasi tantangan dalam sistem kesehatan masyarakat, seperti ketidakadilan dalam distribusi layanan kesehatan. Melalui penelitian ini, mereka dapat mengusulkan solusi yang lebih adil dan efisien untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mahasiswa dapat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam kebijakan kesehatan dan akses layanan kesehatan yang setara. Dalam pendidikan kewarganegaraan yang mencakup Prinsip-prinsip Pancasila meresapi perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi kesehatan tidak hanya tersedia bagi segmen tertentu masyarakat, melainkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan sebagai nilai luhur yang diperjuangkan bersama akan menciptakan transformasi positif, tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada skala komunitas sehingga melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai pilar kesehatan masyarakat, usaha bersama membentuk masyarakatyang sehat, berdaya, dan berkeadilan dapat diupayakan

Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, mahasiswa kesehatan dapat lebih peka terhadap isu-isu ketidakadilan dalam

akses layanan kesehatan. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam advokasi untuk kelompok-kelompok marginal yang sering kali terabaikan dalam sistem kesehatan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat di daerah terpencil.

Daftar Pustaka

Aisyah Farra (2024),pancasila Sebagai Pilar Kesehatan Masyarakat dalam Membangun Kesadaran dan Aksi Berbasis Nilai-Nilai Luhur.

Auliarahma, A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kesadaran Sosial di Kalangan Mahasiswa. Kompasiana.

Ayu, C., Larasati, D., Setya, F., Virantika, L., & Yulia, S. (2024). Pancasila Sebagai Pilar Kesehatan Masyarakat dalam Membangun Kesadaran dan Aksi Berbasis Nilai-Nilai Luhur. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, 1(2), 112-117.

Birawa, C. P. (2023). PENGARUH KETERLIBATAN SISWA DALAM ORGANISASI INTRA SEKOLAH TERHADAP KEDISIPLINAN DANPRESTASI BELAJAR (SEBUAH STUDI DI SMA NEGERI 1PATIANROWO). Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRIKediri

Faradila, A. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan yang Komprehensif dalam Mengoptimalkan Akses Kesehatan Masyarakat. Kompasiana.

Indra Wahyu Bintoro, (2023) Transisi demokrasi dan pemenuhan ham dalam perwujudan system Kesehatan nasional (studi banding Indonesia dan kuba).

Rahman, H., & Puspitasari, A. (2020). Membandingkan ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan puskesmas di Wilayah Indonesia Timur. Window of public health journal, 31-37.

Septiana, T. (2024). Pembinaan Civic Disposition Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Jurnal SosioReligi.

Ulfah, I. F., & Nugroho, A. B. (2020). Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember. Jurnal Sosial Politik, 6(2), 201-213.

Wulandari, Y. a. (2024). Analisa Problematika Pendidikan KewarganegaraanDitinjau Berdasarkan Lunturnya Semangat Nasionalisme MasyarakatDusun Banjarmelati Desa Tunjung Kecamatan Udanawu. ProsidingSeminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran. Vol. 3. No. 1.

ZAYYAN, N. M. A.(2018) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERAN PETUGAS MEDIS DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN.

Undang- Undang Republik Indonesia NO 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan

Undang- Undang Republik Indonesia NO 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.